GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**23 November 2007**
Subyek	**:**	**Kerusakan Lingkungan**	**Hari**	**:**	**Jumat**
			Halaman	**:**	**16**

Jakarta Hadapi Krisis Kota

Ketua Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menilai Jakarta saat ini menghadapi krisis kota. Indikasinya, kesemrawutan, kemacetan, kerusakan lingkungan, banjir dan kesenjangan sosial yang kian lebar sudah melanda ibu kota. “Rendahnya tingkat partisipasi warga ibu kota menjadi sebab terjadinya penumpukan penyimpangan dan pada gilirannya menyebabkan terjadinya krisis kota,” kata Sri Palupi dalam lokakarya Tata Ruang Jakarta yang Nyaman bagi Semua yang digelar Dinas Tata Kota DKI, Kamis (22/11).

Sebagai kota metropolitan, Palupi melihat, Jakarta telah tumbuh demikian cepat dan mengalami banyak mutasi fisik. Namun, sebagian besar warga menilai pertumbuhan itu belum menandakan perkembangan ke arah lebih baik. Alasannya, pertumbuhan belum dirasakan manfaatnya oleh segenap warga. Bahkan masih ada warga yang merasa dirugikan oleh pertumbuhan Jakarta.

Hasil survei Institute for Ecosoc Rights terhadap 505 warga Jakarta pada Mei-Juni 2007 menunjukkan, sedikitnya 44,2 persen warga merasa tidak menerima manfaat atas pertumbuhan dan perubahan tata ruang kota Jakarta. Bahkan, ada 15,8 persen warga yang justru merasa dirugikan oleh pertumbuhan dan perubahan fisik Jakarta.

"Warga yang merasa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan dan perubahan tata ruang Jakarta sebesar 31,7 persen. Selebihnya, 8,3 persen tidak memberikan jawaban," ungkapnya.

Menurutnya, hasil survei tersebut menunjukkan sebagian besar atau 60 persen warga Jakarta belum merasakan manfaat pengelolaan ruang kota. Hal itu mengindikasikan bahwa Jakarta menghadapi persoalan serius menyangkut peran serta warganya. Sebab, undang-undang yang terkait dengan penataan ruang mengamanatkan setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai akibat penataan ruang.

Yayat Supriatna, pakar planologi Universitas Trisakti, mengungkapkan hal serupa. Hasil kajian Tim Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2000-2010, menunjukkan jumlah rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang melibatkan organisasi nonpemerintah (NGO) dalam pengawasan dan penertiban sangat rendah, hanya 28,39 persen.

Sementara itu, jumlah NGO yang mengadukan masalah pemanfaatan ruang hanya 7,88 persen. "Kondisi ini menunjukkan pelibatan masyarakat secara khusus dalam proses pelaksanaan dan pemanfaatan ruang dirasa masih sangat kurang."

Menurut Yayat, akar persoalan rendahnya kinerja penataan ruang ibu kota karena kualitas RTRW yang kurang memadai sebagai acuan, tidak ditemuinya kondisi awal dan target tahunan dan bahkan hampir separuhnya tidak punya target capaian akhir masa rencana (2010). Selain itu, sulitnya pengawasan dan pengendalian karena tidak disertai sanksi tegas.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Karena itu RTRW 2010 harus kembali dievaluasi. Apalagi, Pemerintah DKI sudah memiliki rencana program seperti *double-track* kereta api pada 2009, *subway* (2014), banjir kanal timur (2008), *busway* 15 koridor (2010), *waste to energy*, dan program infrastruktur makro lain. "Hal itu perlu diterjemahkan ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan Pemerintah DKI memiliki komitmen menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman dan sejahtera bagi semua. "Masalah banjir, kemacetan dan pelanggaran pendirian bangunan masih menjadi isu utama yang harus diperhatikan segenap aparat pemerintah DKI," kata Fauzi saat memberi sambutan pada acara tersebut.

Sebagian masalah tersebut, kata Gubernur, terkait dengan kebijakan tata ruang. Karena itu, ia berharap Unit Kerja Pemerintah DKI yang terkait, juga seluruh warga ibu kota lebih memahami pengertian dasar kota, sekaligus mampu mengidentifikasi permasalahan aktuan dan faktual.

Ahmad Muhajir

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP